

**PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PADA ATRIBUT
KEMATANGAN *AWARENESS AND COMMUNICATION*
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN AGAM
MENGUNAKAN *E-GOVERNMENT CAPABILITY MATURITY MODEL***

TESIS



**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
Gelar Magister Chief Information Officer**

**Oleh :
IRWAN
NIM. 1200143**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

ABSTRACT

Irwan, 2016. *Maturity Level Assesment at Maturity Attributes Awareness and Communication in Implementation of E-Government in Agam District Using E-Government Capability Maturity Model.*

Agam has organized e-government program since 2003, which marked the launch of the web site Agam District Government which can be accessed at the address: <http://agamkab.go.id>. After twelve years running, from 43 (forty-three) institution units in Agam, half already have an official web site. From the entire web site is only ten percent are evolving toward maturation phase, the rest are still at the stage of preparation. To determine the condition and the attention of local governments in implementing e-government program in Agam District required an assessment of action.

This research is a descriptive study using a combination of quantitative research design with nested qualitative concurrent type. Framework used in this study is an e-Government Capability Maturity Model. This study aims to determine the maturity level at maturity attributes of awareness and communication on the implementation of e-government program in Agam District.

The results of this study indicate that the organizers of the eight agencies that rated e-government, four institutions are at level one, three institutions are at level two, and one institution is at level three. For Agam District, the level of maturity at maturity attributes of awareness and communication in implementation of e_government at the level of two.

Keywords : *Maturity Level Assesment, E-Government Capability Maturity Model, Maturity Attributes Awareness and Communication.*

ABSTRAK

Irwan, 2016. Penilaian Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan Awareness and Communication Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Agam Dengan Menggunakan E-Government Capability Maturity Model. Tesis Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Kabupaten Agam telah menyelenggarakan program *e-government* sejak tahun 2003, yang ditandai dengan peluncuran *web site* Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang bisa diakses pada alamat: <http://agamkab.go.id>. Setelah dua belas tahun berjalan, dari 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Agam, separuhnya sudah memiliki *web site* resmi. Dari keseluruhan *web site* tersebut hanya sepuluh persennya yang berkembang menuju tahap pematangan, sisanya masih berada pada tahap persiapan. Untuk mengetahui kondisi dan perhatian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program layanan *e-government* di Kabupaten Agam dibutuhkan sebuah tindakan *assesment*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan desain penelitian gabungan kuantitatif dengan kualitatif tipe *concurrent nested Framework* yang digunakan didalam penelitian ini adalah *e-Government Capability Maturity Model*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan pada atribut kematangan *awareness and communication* dari penyelenggaraan program *e-government* di Kabupaten Agam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan instansi penyelenggara *e-government* yang dinilai, empat instansi berada pada tingkat kematangan level satu, tiga instansi berada pada tingkat kematangan level dua, dan satu instansi berada pada tingkat kematangan level tiga. Untuk tingkat Kabupaten Agam, tingkat kematangan pada atribut kematangan *awareness and communication* penyelenggaraan program *e-government* berada pada level dua.

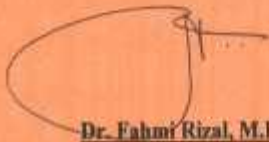
Kata Kunci : Penilaian tingkat kematangan, *e-Government Capability Maturity Model*, Atribut kematangan *Awareness and Communication*.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : Irwan
NIM : 1200143
Program Studi : Magister (S2) CIO

MENYETUJUI

Pembimbing I,



Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.
NIP. 19591204 198503 1 004

Pembimbing II,



Dr. Efrizon, M.T.
NIP. 19650409 199001 1 001

PENGESAHAN

Dekan,



Dr. Syahril, S.T., MSCE., Ph.D.
NIP. 19640506 198903 1 002

Ketua Pascasarjana FT,



Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.
NIP. 19520822 197710 1 001

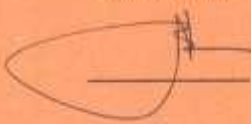




PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS

TESIS

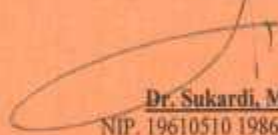
Mahasiswa : Irwan
NIM : 1200143

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis

Program Magister *Chief Information Officer*
Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Tanggal : 6 April 2016

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Efrizon, M.T.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. Nurhasan Svah, M.Pd.</u> (Anggota)	
4	<u>Muhammad Adri, S.Pd., M.T.</u> (Anggota)	
5	<u>Drs. Zuhendra, M.Kom.</u> (Anggota)	

Padang, 6 April 2016
Program Studi Magister (S2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Ketua,


Dr. Sukardi, M.T.
NIP. 19610510 198603 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul "**Penilaian Tingkat Kematangan pada Atribut Kematangan *Awareness and Communication* Penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Agam dengan Menggunakan *e-Government Capability Maturity Model***" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, April 2016
Saya yang menyatakan,



Irwan
NIM. 1200143

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul “Penilaian Tingkat Kematangan pada Atribut Kematangan *Awareness and Communication* Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Agam dengan Menggunakan *E-Government Capability Maturity Model*”.

Dalam melaksanakan penelitian ini Peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Fahmi Rizal, M.Pd.,M.T. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Efrizon, M.T. selaku pembimbing II yang telah membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Dr. Nurhasan Syah, M.Pd., Muhammad Adri, S.Pd, M.T., dan Drs. Zuhendra, M.Kom. selaku Kontributor yang memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini;
3. Bapak Drs. Syahril, S.T, MSCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
4. Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed. selaku Ketua Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Fahmi Rizal, M.Pd. M.T. selaku Ketua Program Magister (S2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Muhammad Adri, S.Pd, M.T. selaku Pengelola Program Magister (S2) *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Dr. Yohanes Bandung, Muhammad Adri, S.Pd. M.T., Dr. Fahmi Rizal, M.Pd. M.T. selaku validator instrumen yang dipakai dalam penelitian ini;

8. Para Dosen Pengajar pada Program Magister (S2) *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman kepada Peneliti selama menjalani perkuliahan;
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah memberikan biaya berupa beasiswa pendidikan pada program Magister *Chief Information Officer* ini;
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, khususnya kepada Dishubkominfo Kabupaten Agam, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, KPMPT Kabupaten Agam, BKD Kabupaten Agam, Disdukcapil Kabupaten Agam, DPPKA Kabupaten Agam, Disdikpora Kabupaten Agam dan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan informasi pada penelitian ini;
11. Rina Martin, M.Si., sebagai istri yang senantiasa menguatkan Peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini;
12. Teman-teman mahasiswa program Magister *Chief Information Officer* angkatan 2012 yang telah berpartisipasi memberikan dukungan moril kepada Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu Peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga topik penelitian ini dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan Peneliti, semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada khususnya.

Padang, April 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	7
1. <i>E-Government</i>	7
a. Konsep <i>E-Government</i>	7
b. Tahap Perkembangan <i>E-Government</i>	9
c. Transformasi Menuju <i>E-Government</i>	12
d. Jenis Aplikasi Pada <i>E-Government</i>	14
2. Penilaian <i>E-Government</i>	17
a. <i>E-Government Readiness Assesment</i>	17
b. <i>E-Government Capability Assesment</i>	19
1) <i>E-Government Capacity Check</i>	19

2) <i>E-Government Maturity Model</i>	21
3) COBIT	21
4) <i>E-Government Capability Maturity Model</i>	26
3. Model dan Atribut Kematangan	41
4. Pendekatan Penelitian	45
5. Profil Daerah Kabupaten Agam	54
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	58
C. Kerangka Pikir	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Desain Penelitian	62
B. Prosedur Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian	63
D. Populasi dan Sampel Penelitian	63
E. Variabel Penelitian	65
F. Teknik Pengumpulan Data	66
G. Instrumen Penelitian	66
H. Validitas Instrumen	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Organisasi Yang Dinilai	69
B. Hasil Penilaian	78
C. Pembahasan	85
D. Keterbatasan Penelitian	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	91
B. Implikasi	92
C. Saran	93
DAFTAR RUJUKAN	96
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Hasil Penilaian PeGI Untuk Kabupaten Agam Tahun 2012	4
2.1	Model-Model Tingkat Kematangan <i>e-Government</i>	12
2.2	Tipe Desain Metode Campuran Berdasarkan Empat Kriteria	50
3.1	Waktu Kegiatan Penelitian	63
3.2	Penetapan Objek Penelitian	65
3.3	Daftar Fungsi Organisasi Dan Jumlah Responden Penelitian	67
3.4	Validator Instrumen Penelitian	68
4.1	Level dan Karakteristik Tingkat Kematangan Instansi Pada Atribut Kematangan <i>Awareness And Communication (AC)</i>	78
4.2	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Dishubkominfo Kabupaten Agam	79
4.3	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Bagian AP. Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	80
4.4	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk KPMPT Kabupaten Agam	80
4.5	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Disdikpora Kabupaten Agam	81
4.6	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk BKD Kabupaten Agam	82
4.7	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	82
4.8	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Disdukcapil Kabupaten Agam	83
4.9	Nilai dan Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk DPPKA Kabupaten Agam	83
4.10	Nilai Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Seluruh Objek Penelitian	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Elemen Keberhasilan Program <i>e-Government</i>	2
2.1 Fase Pengembangan <i>e-Government</i>	10
2.2 Sistem Hubungan <i>Partnership</i> Dalam <i>e-Government</i>	16
2.3 25 Sub Aspek Penilaian Pada <i>e-Government Capacity Check</i>	20
2.4 <i>E-Government Capability Maturity Model</i>	27
2.5 <i>Model Kematangan</i> Proses Pada COBIT	42
2.6 Keterkaitan Antar Atribut Kematangan pada COBIT	44
2.7 Komponen dan Proses Penelitian Kuantitatif	46
2.8 Tahapan Penelitian Kualitatif	48
2.9 Desain Tipe <i>Sequential Explanatory</i>	51
2.10 Desain Tipe <i>Sequential Exploratory</i>	51
2.11 Desain Tipe <i>Sequential Transformative</i>	52
2.12 Desain Tipe <i>Concurrent Triangulation</i>	53
2.13 Desain Tipe <i>Concurrent Nested</i>	53
2.14 Desain Tipe <i>Concurrent Transformative</i>	54
2.15 Peta Geografis Kabupaten Agam	55
2.16 Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Agam	57
3.1 Prosedur Dasar Penelitian	62
3.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	68
4.1 Posisi Level Kematangan Pada Atribut Kematangan AC Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Pada Tahun 2014	85
4.10 Posisi Peringkat Penilaian Kabupaten Agam Pada Kegiatan PeGI Tahun 2012	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Izin Penelitian	98
2. Transkrip Wawancara Awal (Pra Penelitian)	99
3. Transkrip Wawancara pada Penelitian Kualitatif Pertama	100
4. Kuesioner Penelitian	114
5. Validasi Instrumen Penelitian	135
6. Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Objek Penelitian	138
7. Daftar Responden dan Rekapitulasi Penilaian Kuesioner	146
8. Penilaian Objek Penelitian pada Penelitian Kuantitatif	148
9. Observasi dan Transkrip Wawancara Pada Penelitian Kualitatif Kedua	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan *e-government* secara nasional di Republik Indonesia ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut telah mengamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

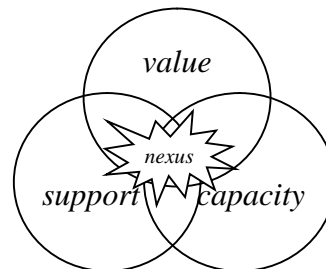
Pengembangan *e-government* adalah sebuah tugas besar yang memerlukan perencanaan yang baik dan pentahapan dalam implementasinya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 juga menyatakan tentang tahap pengembangan *e-government* yang terdiri dari empat tingkatan yaitu: tahap persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Tingkat pertama adalah tahap persiapan yang meliputi tahap pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM dan penyiapan sarana akses informasi digital. Tingkat kedua merupakan tahap pematangan, yang meliputi tahap pembuatan situs informasi publik interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat ketiga merupakan tahap pemantapan, yang meliputi tahap pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Dan tingkat keempat adalah tahap pemanfaatan, yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat internal antar pemerintah (G2G), antara pemerintah dengan kalangan dunia usaha (G2B), dan antara pemerintah dengan masyarakat (G2C) yang terintegrasi pada level proses, data dan teknologi.

Usaha untuk menaikkan tingkatan dalam pengembangan *e-government* menyebabkan terjadinya perubahan paradigma, pola pikir dan budaya kerja

pada seluruh jajaran birokrat yang terlibat. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan dalam usaha menaikkan tingkat pengembangan *e-government* dibutuhkan dukungan sistem, kebijakan, manajemen, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* pada tahun 2000, keberhasilan dalam menerapkan konsep *e-government* pada sektor publik ditentukan oleh tiga elemen penting. Masing-masing elemen tersebut seperti terlihat pada Gambar 1.1 adalah: dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan manfaat (*value*).



Gambar 1.1. Elemen Keberhasilan Program *E-government*

Sumber: Indrajit (2005:30)

Dukungan (*support*) atau unsur “*political will*” adalah adalah elemen paling penting yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam penyelenggaraan program *e-government*. Dukungan ini nampak dalam wujud kebijakan, sosialisasi program ke masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan *e-government*. Dan kapasitas (*capacity*) merupakan elemen yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan program *e-government*. Kapasitas ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang cukup dalam penyelenggaraan *e-government*.

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku penyelenggara *e-government*. Sementara itu, elemen ketiga yaitu manfaat (*value*) merupakan aspek yang dilihat dari sisi penerima manfaat program *e-government*. Penerima manfaat tersebut bisa dari kalangan pemerintah sendiri, kalangan bisnis, atau dari kalangan masyarakat luas.

Perpaduan antara ketiga elemen penting tersebut akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *e-government* (*nexus*) yang menjadi kunci

keberhasilan penyelenggaraan program *e-government*. Jika ketiga elemen penting tersebut lemah atau kurang diperhatikan oleh sebuah pemerintahan dalam menerapkan konsep *e-government*, maka besar kemungkinan implementasi *e-government* didalam penyelenggaraan pemerintahan akan mengalami kegagalan.

Kabupaten Agam telah menyelenggarakan program *e-government* sejak tahun 2003, yang ditandai dengan peluncuran *web site* Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang bisa diakses pada alamat: <http://agamkab.go.id>. Langkah ini kemudian diikuti oleh sejumlah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Perangkat daerah sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2008 adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 12 (dua belas) Dinas Daerah, 13 (tiga belas) Lembaga Teknis Daerah dan 16 (enam belas) Pemerintah Kecamatan.

Dari 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, separuhnya sudah memiliki *web site* resmi. Dari keseluruhan *web site* tersebut hanya sepuluh persennya yang berkembang menuju tahap pematangan, sisanya masih berada pada tahap persiapan.

Mengembangkan tahapan *e-government*, bukan hanya berarti membangun dan mengembangkan *web site*, namun juga harus membangun sistem aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur dan kebijakan, dan transformasi layanan penyelenggaraan pemerintah berbasis manual menuju layanan digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sudah sejauh mana proses transformasi menuju *e-government* di Kabupaten Agam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan sebuah tindakan penilaian (*assessment*) penyelenggaraan program *e-government* di Kabupaten Agam.

Penilaian tersebut pernah dilakukan oleh Direktorat *E-Government* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Pemeringkatan *e-Government*

Indonesia (PeGI) tahun 2012, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Data ini diambil dari web site resmi PeGI pada alamat: <http://pegi.layanan.go.id>. Ini merupakan data penilaian terakhir untuk Kabupaten Agam, karena setelah itu belum ada penilaian lagi dari PeGI. Setiap tahunnya hanya sepuluh persen dari Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengikuti kegiatan PeGI ini.

Tabel 1.1. Hasil Penilaian PeGI Untuk Kabupaten Agam Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Dimensi					Nilai rata- rata	Kategori
	Kebija- kan	Kelem- bagaan	Infra- struktur	Aplikasi	Perencana- an		
Kabupaten Agam	3,04	2,60	2,24	2,23	2,07	2,44	Kurang

Sumber: pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2012/SumateraBarat

Penilaian dilakukan pada lima dimensi *e-government* yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Hasil penilaian secara keseluruhan dinyatakan kedalam empat predikat penilaian yaitu:

1. Nilai 1,0 s/d 1,6 : Sangat Kurang
2. Nilai 1,6 s/d 2,6 : Kurang
3. Nilai 2,6 s/d 3,6 : Baik
4. Nilai 3,6 s/d 4,0 : Sangat Baik

Kabupaten Agam mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dengan predikat penilaian: kurang. Nilai yang dihasilkan dari penilaian Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) ini menggambarkan kondisi penyelenggaraan *e-government* untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dinilai.

Penilaian PeGI ada pada tingkat makro dan bersifat umum, sedangkan setiap instansi penyelenggara program *e-government* pada pemerintah daerah Kabupaten Agam memiliki kondisi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui kondisi pada tingkat instansi dalam menyelenggarakan program *e-government*, dibutuhkan suatu penilaian tingkat kematangan (*maturity level*).

Salah satu model yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan lembaga/instansi penyelenggara *e-government* adalah *E-government Capability Maturity Model*. Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Hyunjung Lee bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2011. Salah satu ciri dari *E-Government Capability Maturity Model* adalah menggunakan atribut kematangan dalam penilaiannya.

Menurut Surendro (2009), atribut kematangan mempunyai peran penting dalam menentukan tingkat kematangan suatu proses teknologi informasi. Ada 6 (enam) atribut kematangan didalam model ini yaitu: kepedulian dan komunikasi (*awareness and communication*); kebijakan, standard, dan prosedur (*policies, standards, and procedures*); perangkat bantu dan otomatisasi (*tool and automation*); keterampilan dan keahlian (*skills and expertise*); pertanggungjawaban internal dan eksternal (*responsibility and accountability*); penetapan tujuan dan pengukuran (*goal setting and measurement*). Salah satu keunggulan dari model ini adalah adanya rekomendasi aksi yang diberikan untuk meningkatkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari instansi penyelenggara *e-government* yang dinilai.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memahami latar belakang masalah diatas, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Setelah dua belas tahun berjalan, layanan *e-government* yang diselenggarakan oleh sebagian besar instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada umumnya masih berada pada fase persiapan (tingkat 1), hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perhatian dan kesadaran instansi dalam menyelenggarakan layanan *e-government* di Kabupaten Agam.
2. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan program *e-government* di Kabupaten Agam.

C. Batasan Masalah

Aspek dan indikator penilaian mengacu kepada model yang digunakan didalam penelitian ini yaitu *e-Government Capability Maturity Model*. Model ini memiliki 6 (enam) atribut kematangan. Mengingat banyaknya jumlah pertanyaan kuesioner untuk setiap atribut kematangan, maka penelitian ini dibatasi untuk menilai berdasarkan atribut kematangan yang pertama, yaitu : *Awareness and Communication (AC)*, tingkat perhatian dan komunikasi instansi penyelenggara program *e-government* di Kabupaten Agam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Seberapa tinggi tingkat kematangan pada atribut kematangan *Awareness and Communication (AC)* dari penyelenggaraan program *e-government* di Kabupaten Agam?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan (*maturity level*) pada atribut kematangan *Awareness and Communication (AC)* dari penyelenggaraan program *e-government* di Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kematangan instansi penyelenggara program *e-government* di Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan program *e-government* bagi instansi yang menjadi objek penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian meliputi: (a) Kesimpulan, (b) Implikasi, dan (c) Saran penelitian.

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan program *e-government* dengan menggunakan *e-Government Capability Maturity Model* pada atribut kematangan *Awareness and Communication* (AC) di Kabupaten Agam, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai, terdapat 3 (tiga) tingkat kematangan yang berbeda, yaitu:
 - a. Tingkat Kematangan pada atribut kematangan AC level 3 (tiga) yaitu level proses terdefinisi, ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Salah satu karakteristik penting tingkat kematangan instansi pada atribut kematangan AC level proses terdefinisi adalah adanya pemahaman *stake holder* instansi untuk melaksanakan aktivitas proses teknologi informasi pada indikator menurut standar yang berlaku.
 - b. Tingkat kematangan pada atribut kematangan AC level 2 (dua) yaitu level proses terpola, ada pada 4 (empat) SKPD, yaitu: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam. Salah satu karakteristik penting tingkat kematangan instansi pada atribut kematangan AC level proses terpola adalah sudah ada perhatian *stake holder* instansi terhadap pengenalan, pelatihan dan pengembangan aktivitas proses teknologi informasi yang terkait dengan penyelenggaraan layanan *e-government*.
 - c. Tingkat kematangan pada atribut kematangan AC level 1 (satu) yaitu

level inisial, ada pada 3 (tiga) SKPD, yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Salah satu karakteristik penting tingkat kematangan instansi pada atribut kematangan AC level inisial adalah sudah munculnya kesadaran *stake holder* instansi akan kebutuhan terhadap aktivitas proses teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan program layanan *e-government*.

2. Tingkat kematangan pada atribut kematangan *Awareness and Communication* (AC) penyelenggaraan program *e-government* untuk tingkat Kabupaten Agam rata-rata ada pada level 2 (dua). Artinya, sudah ada perhatian *stake holder* instansi penyelenggara program *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap kegiatan pengenalan, pelatihan dan pengembangan aktivitas proses teknologi informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan program *e-government*.

B. Implikasi

Dampak yang diharapkan setelah penilaian tingkat kematangan ini adalah adanya peningkatan perhatian dan kesadaran dari instansi penyelenggara program *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap proses-proses teknologi informasi pada kelima domain yang mempengaruhi tingkat kematangan instansi dalam menyelenggarakan program *e-government*.

Dengan penilaian ini, diharapkan instansi penyelenggara program dan layanan *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dapat menyusun langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan instansi dalam menyelenggarakan program *e-government*. Penilaian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk program peningkatan kematangan instansi penyelenggara program dan layanan *e-government* di Kabupaten Agam.

C. Saran

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, secara umum peneliti menyarankan kepada masing-masing instansi penyelenggara program *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam agar memperhatikan rekomendasi aksi pada setiap domain penilaian yang dapat dilihat pada Lampiran 8 (halaman 159 s/d 188).

Untuk meningkatkan level kematangan instansi dalam penyelenggaraan program layanan *e-government*, disarankan kepada:

1. Dishubkominfo Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain AI, terutama proses:
 - a. Mengidentifikasi layanan-layanan yang bisa dijadikan layanan elektronik.
 - b. Merencanakan detail dan persyaratan teknis software aplikasi dari layanan elektronik yang akan dilaksanakan.
 - c. Mengembangkan metodologi dan proses final untuk mengelola proses pengembangan aplikasi.Juga memperhatikan proses-proses pada domain ME, terutama proses:
 - a. Menetapkan suatu pendekatan umum dari kerangka kerja monitoring.
 - b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data monitoring.
 - c. Menetapkan metode monitoring, contoh: metode *balanced scorecard*.
 - d. Menilai dan melaporkan kinerja.
2. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:
 - a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.
 - b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan *performance* TI saat ini.
 - c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.
3. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:

- a. Pendirian struktur organisasi TI yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TI dan layanan elektronis yang dilaksanakan instansi.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan SDM TI dan melaksanakan kebijakan di bidang SDM TI (rekrutmen dan pelatihan).
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:
- a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.
 - b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan *performance* TI saat ini.
 - c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.
- Juga proses-proses TI yang ada pada domain DS, terutama proses:
- a. Merumuskan sebuah kerangka kerja untuk penetapan layanan-layanan TI yang akan dilaksanakan.
 - b. Membangun sebuah katalog layanan TI.
5. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses TI yang ada pada domain AI, terutama proses:
- a. Mengidentifikasi layanan-layanan yang bisa dijadikan layanan elektronis.
 - b. Merencanakan detail dan persyaratan teknis software aplikasi dari layanan elektronis yang akan dilaksanakan.
 - c. Mengembangkan metodologi dan proses final untuk mengelola proses pengembangan aplikasi.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:
- a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.
 - b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan *performance* TI saat ini.
 - c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.
7. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, prioritas perhatian diberikan kepada indikator pengelolaan kinerja dan kapasitas layanan. Proses-proses TI yang ada pada indikator ini adalah:

- a. Membuat sebuah proses perencanaan untuk merevisi kinerja dan kapasitas sumber daya TI.
 - b. Menyediakan kapasitas dan kinerja sumber daya TI untuk beban kerja saat ini.
 - c. Memantau dan melaporkan kapasitas dan kinerja dari sumber daya TI.
 - d. Mengidentifikasi kecenderungan beban kerja di masa depan, sebagai bahan untuk membuat perencanaan kapasitas dan kinerja sumber daya TI di masa depan.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:
- a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.
 - b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan *performance* TI saat ini.
 - c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.
 - d. Menganalisis dan mengelola portofolio layanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alshomrani, S. 2012. A Comparative Studi on United Nations E-government Indicators between Saudi Arabia and USA. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, Vol. 3 No. 3.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., Gutmann, M.L., & Hanson, W.E. 2003. *Advanced mixed methods research designs*. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* (pp. 209–240). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Danareka, Ria. 2014. Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1. Penelitian *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Depkominfo RI. 2005. *Cetak Biru Sistem Aplikasi e-government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Fang, Z. 2002. E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *International Journal of The Computer, The Internet and Management*, Vol.10, No.2, pp. 1-22.
- Gonzalo Valdes, Mauricio Sollar, Hernan Astudillo et al. 2011. *Conception, Development and Implementation of an E-government Maturity Model in Public Agencies*. *Government Information Quarterly*.
- Guritno, S., Sudaryono, Raharjo, U. (2011). *Theory and Application of IT Research // Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*. Ed. I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hyunjung Lee, Yoon S.Y. Mikiro Mukai, 2011. *E-Government Capability Maturity Model*. s.l.: Asian Development Bank.
- Ibrahim A. Alghamdi, Robert Godwin, Giselle Rampersad. 2011. *E-government Readiness Assesment for Government Organisations in Developing Countries*. Computer and Information Science Published by Canadian Center of Science and Education, Vol.4 No.3.
- Indrajit, R. E. 2005. *Electronic Government. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: Unknown.
- Inpres Republik Indonesia No.3 tahun 2003 tanggal 9 Juni tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Lee, N. Y. 2009. *Academy of ICT Essentials for Government Leader*. Incheon City, Republik of Korea: UN-APCICT.

- Kasiram, M. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*. Malang. UIN – Maliki Press.
- KPMG Consulting LP. 2004. *E-government Capacity Check*. <http://www.tbs.sct.gc.ca/emf-cag/risk-risques/tools-outils-eng.asp>, diakses pada bulan Maret 2014.
- Mohamed Shareef, Adegboyega Ojo, Thomasz Janowski. 2008. *A Readiness Assesment Framework for E-government Planning - Design and Application*. Cairo, Egypt: s.n.
- Oyomno, G. Z. 2003. *Towards a Framework for Assessing the Maturity of Government Capabilities for 'E-government'*, Johannesburg, South Africa: University of the Witwatersrand.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.5 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.4 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.5 Tahun 2011.
- Princely Ifinedo, Mohini Singh. 2011. Determinants of E-government Maturity in the Transition Economies of Central and Eastern Europe. *Electronic Journal of e-government*, Vol 9(2), pp. 166-182.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2010-2015.
- Sosiawan, E. A. 2008. *Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia*. UPN "Veteran" Yogyakarta: Unknown.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surendro, K. 2009. *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika.
- Surendro, K. 2009. *Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi*. Bandung: Informatika.
- T. Naga Raja, V.V. Venkata Ramana, A. Damodaram. 2012. A. Maturity Model Framework for eGov Applications - eGSARMM. s.l. *Internasional Journal of Computer Application*.
- Wescott, C. G. 2001. *E-government in the Asia Pacific Region*. s.l.: Asian Development Bank.